Sistem Bagi Hasil Kapal Tangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudra Kutaraja Lampulo Kota Banda Aceh (Profit Sharing System Of Fishing Vessels At Kutaraja Lampulo Fishing Port Of Banda aceh city)

M. Aulia Fadhil¹, Elly Susanti¹, Otto Nur Abdulillah^{1*}

¹Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala

*Corresponding author: aroenjeram1959@gmail.com

Abstrak. Pengembangan sektor perikanan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Aceh sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi secara umum. Terdapat 2 kelompok nelayan dalam melakukan produksi perikanan tangkap di Banda Aceh yaitu kelompok nelayan pemilik dan kelompok nelayan penggarap. ABK yang terdapat pada ukuran kapal 30-50 GT rata-rata sebanyak 10 orang dan 50-80 GT sebanyak 26 orang. Proses bagi hasil perikanan menunjukkan bahwa sistem bagi hasil seakan akan telah sesuai dengan rasa keadilan nelayan, yaitu telah memenuhi kriteria minimum yang harus diperoleh masing-masing pihak. Namun bila dianalisis lebih dalam berdasarkan pada undang-undang bagi hasil perikanan, maka hal ini akan kelihatan jauh menyimpang dari aturan dan rasa keadilan tersebut. Maka perlu dilakukan suatu analisis sistem bagi hasil kapal tangkapan ikan di pelabuhan perikanan Samudra Kutaraja Lampulo Kota Banda Aceh. Besarnya bagian pemilik kapal, juragan laut dan anak buah kapal (ABK) sangat tergantung pada banyaknya anak buah kapal yang digunakan. Oleh karena itu penelitian dilakukan terhadap kapal ukuran 30-50 GT dan kapal 50 – 80 GT yang memiliki ABK yang banyak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil yang berlaku di pelabuhan perikanan Samudra Kutaraja lampulo kota Banda Aceh terhadap kapal dengan ukuran 30-50 GT dan 50-80 GT dan melihat perbedaan perbandingan sistem bagi hasil perikanan yang diterapkan dengan sistem bagi hasil perikanan yang ditetapkan dalam undang-undang No. 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan. Objek dalam penelitian ini yaitu pemilik kapal, tauke bangku, kapten kapal, dan ABK kapal. sedangkan ruang lingkupnya yaitu sistem bagi hasil kapal antara nelayan pemilik Kapal, dan nelayan penggarap di Pelabuhan Perikanan Samudra Kutaraja Lampulo Banda Aceh. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh berdasarkan pengamatan dilapangan melalui wawancara langsung dengan pemilik kapal, toke kapal, toke bangku, kapten kapal dan ABK kapal. Menggunakan model analisis diskriptif untuk menentukan sistem bagi hasil usaha penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudra Kutaraja Lampulo Banda Aceh.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Hasil yang di dapatkan di lapangan tentang sistem pembagian hasil, di dapatkan hasil untuk setiap kapal di Pelabuhan Prikanan Samudra Kutaraja berbeda-beda. Sistem pembagian hasilnya tidak tertulis melainkan hanya berupa kesepakatan antara Tauke Kapal, Tauke Bangku, Kapten Kapal dan ABK. Sistem pembagian hasil kapal ukuran 30-50 GT dan kapal ukuran 50 -80 GT menggunakan alat tangkap *purse seine* di Pelabuhan Samudra Kutaraja, lampulo Kota Banda Aceh diperoleh dari perjanjian yang dibuat secara seksama antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Rata rata pembagian kapal ukuran 30-50 GT untuk Tauke Kapal 52 %. Tauke Bangku sebesar 9 % kapten kapal sebesar 12 % dan ABK sebesar 29 %. Kemudian rata - rata pembagian kapal ukuran 50 – 80 GT untuk Tauke Kapal sebesar 56%, Tauke Bangku ialah 6 % kapten Kapal sebesar 8 % dan ABK sebesar 30%.

Sistem pembagian hasil nelayan kapal ukuran 30-50 GT menerapkan sistem bagi hasil sesuai undang-undang bagi hasil perikanan tahun 1964. Sedangkan kapal ukuran 50 -80 GT menerapkan yang tidak sesuai dengan undang-undang bagi hasil perikanan tahun 1964

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Metode Deskriptif, Kapal Tangkapan Ikan

Abstract The development of the fisheries sector is one of the development priorities in Aceh Province so that it can have a positive impact on economic development in general. There are 2 groups of fishermen in carrying out capture fisheries production in Banda Aceh, namely the owner fisherman group and the cultivating fisherman group. ABK contained in the ship size 30-50 GT an average of 10 people and 50-80 GT as many as 26 people. The process of sharing fishery products shows that the profit sharing system seems to have been in accordance with the fishermen's sense of justice, namely that they have met the minimum criteria that must be obtained by each party. However, if it is analyzed more deeply based on the law on fishery product sharing, then this will appear to deviate far from the rules and sense of justice. So it is necessary to do an analysis of the system for the results of fishing vessels in the fishing port of Samudra Kutaraja Lampulo, Banda Aceh City. The size of the share of capital owners, sea captains and crew members (ABK) is highly dependent on the number of crew

members used. Therefore, the study was conducted on ships with a size of 30-50 GT and ships of 50-80 GT which have a large number of crew members.

This study aims to find out how the profit-sharing system that applies at the Ocean Kutaraja Lampulo fishing port, Banda Aceh city to ships with sizes of 30-50 GT and 50-80 GT and see the differences in the comparison of the fishery product sharing system applied to the established fishery product sharing system. in law no. 16 of 1964 concerning Fishery Revenue Sharing. The objects in this study are the ship owner, bench tauke, ship captain, and ship crew. while the scope is a boat profit sharing system between fishermen who own the ship, and fishermen working at the Kutaraja Lampulo Ocean Fishing Port, Banda Aceh. The type of data used is primary data obtained based on field observations through direct interviews with ship owners, ship toke, bench toke, ship captain and ship crew. Using a descriptive analysis model to determine the profit-sharing system for fishing at the Kutaraja Lampulo Ocean Fishery Port, Banda Aceh.

Based on the research that has been done, it can be concluded as follows. The results obtained in the field regarding the revenue sharing system, the results obtained for each ship in the Prikanan Samudra Kutaraja Port are different. The distribution system for the results is not written but only in the form of an agreement between the Ship Owner, Bench Owner, Ship Captain and ABK. The profit sharing system for vessels measuring 30-50 GT and vessels measuring 50 -80 GT using purse seine fishing gear at the Samudra Kutaraja Port, Lampulo, Banda Aceh City, was obtained from a carefully made agreement between the owner fishermen and the working fishermen. The average distribution of ships size 30-50 GT for Ship Tauke 52%. Bench Tauke by 9%, captain of the ship by 12% and crew by 29%. Then - the average distribution of ships size 50 – 80 GT for Ship Tauke is 56%, Bench Tauke is 6%, Ship captain is 8% and ABK is 30%.

The profit-sharing system for fishing vessels of size 30-50 GT applies a profit-sharing system according to the fishery product-sharing law of 1964. Meanwhile, vessels of size 50-80 GT apply that which is not in accordance with the fish-sharing law of 1964.

Keywords: Profit-sharing system, Descriptive method, Fishing Boat

PENDAHULUAN

Aceh sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan. Luas daratan Provinsi Aceh sebesar 57.365,67 km², sedangkan luas perairannya mencapai 295.370 km² yang terdiri dari 56.563 km² berupa perairan teritorial dan kepulauan serta 238.807 km² berupa perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dengan panjang garis pantai mencapai 2.666,3 km² (Rahmad Mukhtar, 2017).

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar terutama di sektor perikanan. Sektor perikanan telah menjadi salah satu sektor andalan Provinsi Aceh, lebih kurang 55% penduduk Aceh bergantung kepada sektor ini baik secara langsung maupun tidak langsung (Yusuf, 2003).

itu pengembangan sektor perikanan harus menjadi salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Aceh sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi secara umum, khususnya di Provinsi Aceh. Namun faktanya di lapangan kondisi perekonomian sebagian besar, khususnya nelayan Aceh umumnya masih sangat memprihatinkan. Sebagian masyarakat Aceh hingga saat ini masih menjadikan kawasan pantai sebagai kawasan tempat tinggal. Namun, bukan hanya sebagai kawasan tempat tinggal, melainkan juga sebagai sumber kehidupan ekonominya.

Tabel 1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 2011 - 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi (Ton)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Simeulue	5.496	3.713	3.804	4.235	6.630
2	Aceh Singkil	5.228	5.100	6.008	6.420	9.506
3	Aceh Selatan	12.126	12.637	12.751	12.828	18.479
4	Aceh Timur	17.662	17.839	16.573	16.018	10.027
5	Aceh Barat	10.715	12.400	12.557	12.767	9.310
6	Aceh Besar	5.916	6.998	8.074	7.901	9.390
7	Pidie	7.620	8.925	11.545	11.536	9.400
8	Bireuen	10.198	11.269	10.391	9.511	16.494
9	Aceh Utara	9.011	10.144	10.529	11.526	9.309
10	Aceh Barat Daya	11.698	10.473	12.104	10.570	8.072
11	Aceh Tamiang	4.581	3.995	4.059	4.357	4.593
12	Nagan Raya	4.093	4.278	4.926	5.469	4.617
13	Aceh Jaya	4.328	4.214	4.256	4.567	9.042
14	Pidie Jaya	4.818	5.592	6.655	6.967	6.973
15	Banda Aceh	7.903	6.848	6.210	6.620	9.313
16	Sabang	2.949	3.728	5.398	7.338	5.150
17	Langsa	11.735	7.432	11.026	11.902	14.195
18	Lhokseumawe	7.540	8.420	6.826	7.405	5.272
Jumlah		143.617	144.005	153.692	157.937	165.772

Sumber : Aceh dalam angka 2016

Kota Banda Aceh merupakan salah satu Kota di Provinsi Aceh yang memiliki jumlah produksi yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 produksi ikan tangkap di Banda Aceh mengalami penurunan 6.848 ton/tahun, dan tahun 2013 menurun sebanyak 6.210 ton/tahun dan kembali meningkat pada tahun 2014. Menurut Sulastri (2014), Kabupaten Banda Aceh mempunyai potensi sumber daya perikanan yang baik.

Pada umumnya cara pembagian hasil penangkapan ikan dilaut melalui sistem bagi hasil yang dijalankan antara majikan dan buruh atau anak buah kapal (ABK) adalah 20% untuk ongkos perbekalan, sedangkan sisanya 80% akan dibagi dua antara nelayan pemilik (40%) dan nelayan penggarap (40%). Namun juga ada yang pembagiannya menggunakan sistem 4:6, maksudnya nelayan pemilik 4 bagian dan nelayan penggarap mendapatkan 6 bagian.

Tingkat kesejahteraan nelayan sangat dipengaruhi oleh hasil tangkapannya. Jika hasil tangkapannya tinggi, maka pendapatan mereka juga baik dan begitu pula sebaliknya. Selain itu, beberapa faktor yang mempengaruhi hasil tangkapan kapal menurut Sujarno (2008) yang terdiri dari lama melaut, jumlah ABK, dan daerah tangkapan.

Pelabuhan perikanan Lampulo Kota Banda Aceh merupakan salah satu pelabuhan perikanan yang terbesar di Banda Aceh yang dapat menampung banyak kapal ketika setelah melaut membawa hasil tangkapannya. Pelabuhan lampulo dapat memudahkan proses bongkar muat hasil tangkapan, dan proses memudahkan proses jual belinya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji “Sistem Bagi Hasil kapal Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan lampulo Kota Banda Aceh”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana sistem bagi hasil yang berlaku di pelabuhan perikanan Samudra Kutaraja lampulo kota Banda Aceh, terhadap kapal dengan ukuran 30-50 GT dan 50-80 GT? 2) Apakah terdapat perbedaan perbandingan sistem bagi hasil perikanan yang diterapkan di pelabuhan perikanan Samudra Kutaraja lampulo kota Banda Aceh dengan sistem bagi hasil perikanan yang ditetapkan dalam undang-undang No. 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan.?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui sistem bagi hasil yang berlaku di pelabuhan perikanan Samudra Kutaraja lampulo kota Banda Aceh terhadap kapal dengan ukuran 30-50 GT dan 50-80 GT 2) Untuk melihat perbedaan perbandingan sistem bagi hasil perikanan yang diterapkan di pelabuhan perikanan Samudra Kutaraja lampulo kota Banda Aceh dengan sistem bagi hasil perikanan yang ditetapkan dalam undang-undang No. 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Lampulo Kota Banda Aceh. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (*Purposive Sampling*) dengan pertimbangan bahwa daerah penelitian tersebut merupakan pelabuhan terbesar di daerah Banda Aceh.

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah pemilik kapal, tauke bangku, kapten kapal, dan ABK kapal 30-50 GT dan 50-80 GT (*gross Tonnage*). Sedangkan ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tangkapan ikan dan sistem bagi hasil kapal antara Pemilik Kapal, Tauke Bangku, dan ABK di Pelabuhan Perikanan Lampulo Banda Aceh.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer di peroleh melalui kuisioner dan wawancara pada nelayan pemilik dan nelayan penggarap kapal 30-50 dan 50 - 80 GT di Pelabuhan Perikanan Lampulo Kota Banda Aceh. Sedangkan data sekunder diperoleh dari perpustakaan, jurnal serta informasi lain seperti hasil-hasil penelitian sebelumnya serta literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Model Analisis

Pada penelitian ini untuk menentukan sistem bagi hasil usaha penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudra Kutaraja Lampulo Banda Aceh, dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Analisis diawali dengan membuat prosedur identifikasi, evaluasi dan analisis terhadap sistem bagi hasil yang selama ini berlaku di Pelabuhan Perikanan Samudra Kutaraja, dan selanjutnya mensimulasikan sistem bagi hasil yang optimal, dengan mempertimbangkan

kepentingan nelayan di satu sisi, serta kepentingan pemilik pada sisi yang lain secara adil, proporsional, berkeuntungan dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biaya Operasional	Kapal ukuran 30 -50 GT		Kapal ukuran 50 -80 GT	
	Jumlah	Harga (Rp)	jumlah	Harga (Rp)
Solar	2.666 Liter	17.200.000	4.837 Liter	31.200.000
Oli	67 Liter	1.280.000	98 Liter	1.870.000
Es	241 Balok	5.550.000	431 Balok	9.920.000
Air	8,75 Ton	1.750.000	17,6 Ton	3.520.000
Makanan		4.700.000		8.400.000
Biaya Kerusakan		585.714		3.175.000
Total/Trip (Rp)		30.880.000		57.650.000
Per Bulan (2 trip) (Rp)		61.780.000		115.500.000

Sumber : Data Primer (diolah), 2021

Dari Tabel 1 diatas dapat kita ketahui bahwa solar merupakan komponen biaya operasional yang paling besar karena sangat berpengaruh dalam proses penangkapan. Untuk ukuran kapal 30 – 50 GT rata – rata dalam satu trip penangkapan menghabiskan biaya untuk solar sebanyak Rp.17.200.000, sedangkan ukuran kapal 50-80 GT sebanyak Rp31.200.000. Kemudian pengeluaran terbesar lainnya yaitu es sebagai pengawet hasil tangkap, pengeluaran es kapal 30- 50 GT sebesar Rp 5.550.000 sedangkan kapal 50 – 80 GT sebesar Rp 9.920.000. Total rata – rata biaya operasional yang di keluarkan pertrip kapal ukuran 30- 80 GT sebesar Rp 30.880.000 dan untuk kapal ukuran 50 – 80 GT sebesar Rp 57.650.000. Kemudian total rata – rata biaya operasional perbulan selama 2 trip yang di keluarkan kapal ukuran 30 – 50 GT sebesar Rp79.710.000. Selanjutnya total rata- rata biaya operasional perbulan yang di keluarkan kapal ukuran 50-80 GT sebesar Rp115.500.000 dimana banyak trip yang di lakukan 2 kali dalam sebulan. Jumlah trip yang diambil adalah sebanyak dua kali untuk masing-masing kapal jenis 30-5- GT dan 50-80 GT, hal ini didasarkan karena untuk dapat dilaksanakan perbandingan yang adil antara kedua kapal tersebut, yang mana hal ini juga didasari oleh kapal jenis 30-5- GT tidak semuanya memiliki jumlah trip lebih dari pada dua kali di setiap bulannya.

No.	Jenis Ikan	Harga Ikan (Rp/kg)
1.	Tuna	Rp. 40.000
2.	Baby Tuna	Rp. 28.000
3.	Tongkol	Rp. 16.000
4.	Dencis	Rp. 18.000
5.	Salam	Rp. 23.000
6.	Sisik	Rp. 20.000
7.	Sumbo	Rp. 20.000
8.	Rambeu	Rp. 32.000
9.	Selayang	Rp. 15.000
10.	Kerapu	Rp. 30.000

Sumber : Data Primer (Diolah), 2021

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat dilihat Jenis-jenis dan harga ikan di Pelabuhan Perikanan Lampulo Kota Banda Aceh. Harga Ikan yang memiliki harga yang tinggi yaitu ikan tuna yaitu 40.000 Rp/ kg kemudian ikan kerapu dengan harga 30.000 Rp/kg. harga ikan yang paling rendah yaitu ikan selang dengan harga 15.000 Rp/kg. Setiap kapal pulang dari aktifitas melaut mendapat hasil tangkapan dengan jenis ikan yang berbeda-beda, seperti kapal yang melakukan tangkapan di daerah Samudera Hindia tidak mendapatkan jenis ikan kerapu. Karena jenis ikan kerapu berada pada pesisir laut atau bukan daerah Samudera Hindia. Jenis ikan tuna dan baby tuna di dapat dengan cara memancing, biasa kegiatan memancing ikan tuna dilakukan oleh ABK untuk menambah pendapatan mereka jika hasil tangkapan kapal tidak maksimal.

No	Uraian Satuan	Rata - rata (Rp)	Persentase (%)
1	Nilai Produksi	163.810.000	
2	Biaya Operasional	61.780.000	
3	Pendapatan Bersih Usaha	102.030.000	
4	Pembagian Nelayan Pemilik		60 %
	- Tauke Kapal	54.075.900	53 %
	- Tauke Bangku	7.142.100	7%
5	Pembagian Nelayan penggarap		40 %
	- kapten kapal	11.223.300	11 %
	- ABK (per orang)	3.060.900	3 %

Sumber : Data Primer (diolah), 2021

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3 diketahui rata – rata besarnya pendapatan bersih yang di dapat kapal 30 – 50 GT yaitu Rp 163.810.000. Kemudian pendapatan bersih tersebut dibagi 60% untuk nelayan pemilik dan 40 % untuk nelayan penggarap. Nelayan pemilik yaitu tauke kapal mendapatkan bagian 53% sehingga rata – rata pendapatan yang didapatkan tauke kapal yaitu Rp 54.075.900. Pendapatan rata – rata tauke bangku yaitu 7 % atau Rp. 7.142.100. Nelayan Penggarap yaitu kapten kapal mendapatkan bagian 11 % sehingga rata – rata pendaptan yang di dapatkan Rp 11.223.300 dan ABK mendapatkan bagian 29 % dimana rata rata banyaknya ABK 9 orang sehingga per orang mendapatkan bagian 3 % dengan besaran pendapatan yang didapat yaitu Rp 3.060.900.

No	Uraian Satuan	Rata - rata (Rp)	Persentase (%)
1	Nilai Produksi	515.220.000	
2	Biaya Operasional	115.500.000	
3	Pendapatan Bersih Usaha	399.720.000	
4	Pembagian Nelayan Pemilik		62 %
	- Tauke Kapal	223.843.200	56 %
	- Tauke Bangku	22.784.040	6 %
5	Pembagian Nelayan penggarap		38 %
	- kapten kapal	31.577.880	8%
	- ABK (per orang)	3.397.620	0,85 %

Sumber : Data Primer (diolah), 2021

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4 diketahui rata – rata besarnya pendapatan bersih yang di dapat kapal 50 - 80 GT yaitu Rp 399.720.000. Dimana pendapatan bersih tersebut

dibagi ke nelayan pemilik 62% dan 38 % ke nelayan penggarap. Nelayan pemilik yaitu tauke kapal mendapatkan bagian 56% sehingga rata – rata pendapatan yang didapatkan tauke kapal yaitu Rp 223.843.200. kemudian untuk tauke bangku dibagi 6% rata –rata pendapatan yang didapatkan yaitu Rp 22.784.040 . Nelayan Penggarap yaitu kapten kapal mendapatkan bagian 8 % sehingga rata – rata pendaptan yang di dapatkan Rp31.577.880 dan ABK mendapatkan bagian 30 % dimana rata – rata banyaknya ABK 35 orang sehingga per orang mendapatkan bagian 0,85 % dengan besaran pendapatan yang didapat yaitu Rp3.397.620.

Perbandingan pendapatan yang diterima oleh nelayan pemilik dan nelayan buruh 50 – 80 GT berdasarkan lapangan dan Undang-Undang Bagi Hasil No. 16 Tahun 1964. Berdasarkan pemabagian di lapangan pada kapal 50 -80 GT untuk pembagian nelayan pemilik yaitu 62% atau Rp247.826.400 dan nelayan penggarap mendapatkan 38% atau Rp151.893.600. Sedangkan jika menurut pembagian yang diatur undang undang pembagian nelayan pemilik yaitu 60% atau Rp239.832.000 dan pembagian nelayan penggarap yaitu 40% atau Rp159.888.000.

Selisih pembagian hasil berdasarkan dilapangan dengan undang-Undang Bagi Hasil No. 16 Tahun 1964 pada pembagian nelayan pemilik yaitu 2% atau Rp7.994.400 lebih banyak jika menggunakan sistem pembagian hasil berdasarkan di lapangan namun pada pembagian nelayan penggarap menunjukkan pembagian hasil lebih banyak dengan menggunakan sistem pembagian hasil dengan menggunakan undang-Undang Bagi Hasil No. 16 Tahun 1964 dengan selisih 2% atau Rp7.994.400.

Berdasarkan R/C ratio yang menunjukkan kapal ukuran 50 – 80 GT memiliki nilai R/C rasi Rp. 4,46 > 1. artinya setiap pengeluaran Rp. 100, memberikan penerimaan sebesar Rp 446. Biaya operasaional yang dikeluarkan nelayan pemilik kapal 50 - 80 GT lebih besar oleh karena itu untuk menutupi biaya operasional yang dikeluarkan maka presentasi pembagian hasil nelayan pemilik akan lebih besar.

Berdasarkan pembagian dilapangan nelayan pemilik menerima pendapatan lebih besar dari sistem bagi hasil berdasrkan undang- undang bagi hasil. Sedangkan untuk ABK lebih sejahtera atau lebih diuntungkan jika menggunakan aturan undang- undang bagi hasil dari pada bagi pembagian dilapangan. Meskipun bagi hasil berdasakan lapangan kerap merugikan nelayan penggarap, namun aturan ini juga sulit diubah karena masyarakat nelayan sendiri menganggap bahwa bagi hasil ini sudah sesuai dengan keadaan masyarakat setempat, belum lagi dengan rendahnya pendidikan serta ketidakmampuan bersaing membuat nelayan penggarap lebih menerima dari pada tidak mendapat penghasilan. Sedangkan pada perbedaan jumlah pendapatan yang diterima pada kapal 30-50 GT tidak disebutkan lagi perbandingannya Karena sudah sesuai dengan UU No.16 tahun 1964.

Dari hasil penelitian Wiga Yulia Utami (2015) di Provinsi Sumatera Barat persentase pendapatannya untuk kapal 60 GT nelayan pemilik mendapat 50% dan nelayan penggarap mendapat 50% (ABK mendapat 9,09%). Persentase pembagian hasil di Pelabuhan Perikanan Lampulo lebih besar dari persentase pembagian hasil di Provinsi Sumatera Barat. Jika jumlah ABK sebanyak 25 orang maka per ABK mendapat 0,36% per trip dan setiap trip ± 14 hari.

Beberapa nelayan buruh ada yang dibayar secara tunai dan ada juga yang dibayar melalui transfer rekening sesuai permintaan nelayan buruh tersebut. Menurut Alan (2015) berdasarkan pada penelitiannya yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Usaha Purse Seine di Pelabuhan Perikanan Samudera (Pps) Bungus Kota Padang Provinsi Sumatera Barat” menyatakan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan menyebabkan ketimpangan pendapatan yang cukup mencolok antara nelayan pemilik dan nelayan buruh. Sistem bagi hasil yang diterapkan dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan nelayan buruh tentang Undang-undang Bagi Hasil Perikanan yang berlaku di Indonesia. Selain hal-hal tersebut, sulitnya

mendapatkan pekerjaan juga menjadi pertimbangan mereka sehingga bekerja pada kapal purse seine karena pada umumnya pekerjaan yang dapat mereka lakukan selain menjadi nelayan buruh yaitu petani buruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil yang di dapatkan di lapangan tentang sistem pembagian hasil, di dapatkan hasil untuk setiap kapal di Pelabuhan Prikanan Samudra Kutaraja berbeda-beda. Sistem pembagian hasilnya tidak tertulis melainkan hanya berupa kesepakatan antara Tauke Kapal, Tauke Bangku, Kapten Kapal dan ABK. Sistem pembagian hasil kapal ukuran 30-50 GT dan kapal ukuran 50 -80 GT menggunakan alat tangkap *purse seine* di Pelabuhan Samudra Kutaraja, lampulo Kota Banda Aceh diperoleh dari perjanjian yang dibuat secara sepihak antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Rata rata pembagian kapal ukuran 30-50 GT untuk Tauke Kapal 52 %. Tauke Bangku sebesar 9 % kapten kapal sebesar 12 % dan ABK sebesar 29 %. Kemudian rata - rata pembagian kapal ukuran 50 – 80 GT untuk Tauke Kapal sebesar 56%, Tauke Bangku ialah 6 % kapten Kapal sebesar 8 % dan ABK sebesar 30%.
2. Sistem pembagian hasil nelayan kapal ukuran 30-50 GT menerapkan sistem bagi hasil sesuai undang-undang bagi hasil perikanan tahun 1964. Sedangkan kapal ukuran 50 -80 GT menerapkan yang tidak sesuai dengan undang-undang bagi hasil perikanan tahun 1964.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran. Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan keuntungan maksimal, dituntut keprofesionalitasan pihak pemilik kapal dalam mengelola kapal agar terciptanya ABK yang sejahtera.
2. Adanya perbaikan sistem pembagian upah yang diberikan kepada nelayan agar lebih ditingkatkan dalam pengawasan karena di Pelabuhan Samudra Kutaraja, lampulo Kota Banda Aceh upah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, demi kemakmuran dan kesejahteraan nelayan di Pelabuhan Samudra Kutaraja, lampulo Kota Banda Aceh. Untuk mendorong kemampuan dari nelayan maka pemerintah terutama Dinas Perikanan dapat memberikan penyuluhan kepada nelayan bagaimana cara meningkatkan pendapatan dari nelayan

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. 2003. *Analisa Kelayakan Usaha dan Efisiensi pada Penggunaan Alat Tangkap Purse seine di Kota Pekalongan*. Thesis Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ardhyanto, Ryan Rakhmat. 2019. *Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan Pada Nelayan di Pulau Baai Kota Bengkulu*. Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi. Bengkulu.

- Bengen, D.G. 2002. *Ekosistem dan sumber daya alam pesisir dan laut serta prinsip pengelolaannya Sinopsis*. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan. IPB.
- Buwono, Ayom . 2020. Perhitungan Kebutuhan Energi Listrik Untuk Penerangan Pada Kapal Ikan 30 Gt dan 10 Gt Yang Beroperasi Di Pantai Selatan Pulau Jawa. Jurnal Volume X. No. 3. Desember 2020 Issn 2088-060x
- Effendi, I dan Wawan Oktariza. 2006. *Manajemen Agribisnis Kelautan*. Penebar Swadaya, Depok.
- Fadhil, Muhammad. 2019. Sistem Bagi Hasil Kapal Tangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Lampulo Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah Volume 3, Nomor 1, Februari 2018 [Www.Jim.Unsyiah.Ac.Id/JFP](http://www.jim.unsyiah.ac.id/JFP).
- Eko. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Pustaka Pelajar.Jakarta.
- Harini. 200. *Sistem Bagi Hasil Perikanan Laut Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*. Universitas diponegoro. Semarang.
- Indrawadi. 2009. *Nasib nelayan dan Potensi Kelautan*.
<http://www.geocities.com/mInangbaharI/artikel/nasibnelayan.html>. Diakses tanggal : 4 April 2017.
- Linda,Dwi Rejeki. 2016. *Analisis Pembagian Hasil dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan (Studi Kasus Pelabuhan Perikanan Lampulo Kota Banda Aceh)*. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala.
- Mulyadi, S. 2005. *Ekonomi Kelautan*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Murniyati dan Sunarman. 2000. Pendinginan, Pembekuan dan Pengawetan Ikan. Kanisius. Yogyakarta.
- Putong. 2002. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahmad Mukhtar, 2017. Rahmad Mukhtar, Alumnus prodi Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), anggota Ikatan Alumni Mahasiswa (IAM) Aceh Bogor.
- Sasmita S, Widodo. 2006. Sebaran Alat Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Semarang: BPPI.
- Simanjuntak, H. 2002. *Sistem Agribisnis Penangkapan Ikan Laut*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Satria. A. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. PT Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- Sudirman. 2004. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Sudjana, 2002. *Metode Statistika Edisi Keenam*. Tarsito Bandung.
- Sujarno, 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Langkat*. Tesis. Sekolah PascaSarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sukandar, 2013. Pengaruh Panjang Jaring, Ukuran Kapal, Dan Jumlah ABK Terhadap Produksi Ikan Pada Alat Tangkap Purse Seine Di Perairan Prigi Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. *Jurnal Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan*. Vol 1. (NO.1).
- Utami, W.G. 2015. *Analisis Bagi Hasil Nelayan Bagan Apung Yang Tambat Labuh Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Provinsi Sumatera Barat (Kasus Pada KM. Putri Tunggal 02 Dan KM. Putri Tunggal 03)*. Jurnal. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Riau. Vol. 27.
- Wahyono, A. 2003. *Konflik Bagi Hasil Tangkapam Purse Seine Di P \rigi, Trenggalek, Jawa Timur*. Jurnal Masyarakat dan Budaya. Vol 5. (No.1).
- Widodo. 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Yolanda, R. 2013. *Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara, Kab. Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Yolanda, Ivo. 2017. Analisis Pendapatan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Tradisional Di Desa Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah* Volume 2, Nomor 3, Agustus 2017 www.jim.unsyiah.ac.id/JFP
- Yusuf, Q. 2003. *Empowerment of Panglima Laot in Aceh. International workshop on Marine Science and Resource*. Banda Aceh, 11-13 March, 2003.